

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan Inflasi dan Perkembangan Harga Pangan di Daerah

Kabupaten Lombok Timur merupakan Kabupaten yang tidak menghitung Inflasi (Kabupaten Non-IHK) di NTB. Walaupun demikian sebagai salah satu proksi untuk mengetahui tingkat perkembangan harga barang di daerah digunakan metode penghitungan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang merupakan suatu tolok ukur yang digunakan untuk mengetahui perubahan harga barang atau jasa dalam satu periode, sehingga kenaikan atau penurunan barang dapat diketahui.

Walaupun Kabupaten Lombok Timur merupakan Kabupaten Non IHK), namun karena Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu daerah penghasil komoditas pertanian yang cukup besar di Nusa Tenggara Barat, maka peran strategis Kabupaten Lombok Timur mempengaruhi besar kecilnya tingkat inflasi di Kawasan regional di NTB.

Sebagai salah satu tugas Pemerintah Daerah khususnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yaitu berkewajiban untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman dan bermutu, bagi masyarakat secara merata sepanjang tahun. TPID harus mampu mengelola dan memanfaatkan seluruh sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal di daerah untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas di daerah. Oleh karena itu peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sangat penting dan strategis dalam menerapkan kebijakan yang tepat dalam upaya pengendalian dan ketersediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat di daerah.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa harga bahan pangan pokok secara umum bersifat sangat fluktuatif (volatilitas), sehingga perlu secara terus-menerus dipantau dan dijaga ketersediaan dan keterjangkauan harganya. Selain itu, faktor penyebab lainnya yang berpengaruh terhadap naik turunnya harga ini, disebabkan juga karena adanya kelangkaan persediaan akibat cuaca dan jangkauan distribusinya. Oleh karenanya Pemerintah dengan seluruh sumberdaya yang dimiliki harus terus berupaya untuk melakukan monitoring harga secara berkala agar kenaikan harga tidak melonjak terlalu tinggi melalui Sistem Pemantauan Harga Bahan Kebutuhan Pokok. Diharap dengan monitoring harga pangan pokok secara berkala dapat dikendalikan dan dapat dikontrol dengan baik oleh pemerintah. Jika ada indikasi-indikasi kenaikan harga yang akan mempengaruhi daya beli masyarakat pemerintah dapat cepat tanggap untuk mengatasinya melalui instrument dan kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil dari Pemantauan Harga Bahan Kebutuhan Pokok yang ada di Kabupaten Lombok Timur pada Triwulan I Tahun 2024 ini, dijadikan sebagai input untuk perhitungan IPH secara berkala. Dari hasil pemantauan harga awal tahun atau Triwulan I tahun 2024 dapat dilaporkan sebagai berikut :

Data Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Lombok Timur Triwulan I 2024

Januari				Februari				Maret			
M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4

(1.07) (3.69) (4.56) (5.25) (6.98) (1.72) (0.73) (1.32) 7.99 6.86 4.64 3.53

Berdasarkan Data Indeks Perkembangan Harga (IPH) tersebut diatas IPH tertinggi di Kabupaten Lombok Timur terjadi pada minggu I bulan Maret 2024 sebesar 7,99 dan terendah pada minggu I bulan Februari sebesar -6,98.

Adapun komoditas penyumbang Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Lombok Timur yaitu :

- Beras
- Bawang Merah
- Bawang Putih
- Cabai
- Gula Pasir
- Minyak Goreng
- Daging Ayam Ras
- Telur Ayam Ras

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan

1. Salah satu penyebab utama kenaikan harga beras, bawang merah, cabe rawit dan beberapa komoditas pertanian lainnya diakibatkan oleh kurangnya pasokan dari sentra produksi. Faktor cuaca sangat mempengaruhi tingkat produksi khususnya di sector pertanian. Terjadinya fenomena El Nino pada tahun 2023 yang lalu masih dirasakan imbasnya sampai saat ini. Hal ini mengakibatkan musim tanam menjadi terlambat, mempengaruhi ketersediaan beras dan komoditas pertanian lainnya di pasaran.
2. Keterbatasan Sistem Informasi Pangan: Ketidakmampuan dalam mengintegrasikan data pangan secara berkala dan akurat menyebabkan kesulitan dalam memprediksi ketersediaan pangan, yang pada gilirannya mengganggu proses distribusi dan penyediaan di pasaran.
3. Belum berjalannya kerjasama antar daerah secara efektif sehingga menyebabkan distribusi dan pasokan komoditas sering terganggu sehingga disparitas harga komoditas cukup tinggi.
4. Sifat komoditas hasil pertanian yang tidak dapat bertahan lama sehingga sangat beresiko apabila dilakukan distribusi antar daerah terutama yang jarak dan waktu tempuhnya cukup jauh.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pelaksanaan Kebijakan Inflasi

Sebagai daerah yang memiliki areal sawah yang besar yaitu **43.146 hektar (26,87%) luas wilayah kabupaten (BPS 2023)** dimana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, maka focus kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam

penanganan inflasi adalah dengan menjaga produktivitas sector pertanian tetap tinggi terutama komoditas yang sering muncul sebagai pemicu inflasi yaitu padi, cabai, bawang putih, bawang merah dan aneka produk hortikultura lainnya.

Adapun beberapa kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Program Penguatan Produktivitas Pertanian sebagai Komitmen Pemerintah Daerah dalam Penanganan Inflasi dan Tetap Menjaga Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang rendah.

Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu lokasi sasaran Kementerian Pertanian dalam upaya menjaga Produksi Pangan Nasional tetap terjaga. Ada beberapa program yang ditetapkan yaitu :

12. Program Gerakan Nasional (Gernas) Padi dalam rangka Untuk mengantisipasi terjadinya El Nino dan mengantisipasi dampak buruk penurunan produksi dapat mencapai 1,2 juta ton beras, Kementerian Pertanian siapkan lahan seluas 500 ribu hektar untuk menanam padi pada 10 provinsi. Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat alokasi tanam seluas 12.000 Ha. di 5 Kabupaten, Lombok Timur menjadi salah satu Kabupaten sasaran Gernas Tahun 2023 dengan realisasi tanam seluas 5.000 Ha yang diperkirakan akan panen pada awal bulan Maret 2024.
13. Pengembangan Kawasan Bawang Putih Sembalun dengan luas areal mencapai 667 hektar, diperkuat dengan dana APBN dan Proyek UPLAND merupakan kegiatan pertanian di dataran tinggi yang komprehensif, mulai dari pengembangan on-farm sampai off-farm. Proyek pilot (percontohan) UPLAND telah berlangsung di empat belas kabupaten di Indonesia, Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu lokasi sasaran Proyek. Tujuan UPLAND Project yaitu untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani khususnya bawang putih
14. Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu sentra Cabe nasional dengan luas areal tanam 7.529 hektar. Disamping itu Lombok Timur menjadi lokasi "Champion Cabai", yang merupakan mitra resmi Kementerian Pertanian melalui Program Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat di Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Salah seorang Mitra dari Kabupaten Lombok Timur yaitu Haji Subhan. Champion Cabai Indonesia Lombok Timur memiliki kuota 500 hektar lahan cabai. Champion harus siap menyuplai cabai ke Jakarta dan kota lain untuk melakukan stabilisasi harga, dengan kewajiban menjual dengan selisih lebih rendah di bawah harga pasar.
15. Penguatan Produksi Bawang Merah Lokal

Luas areal tanam bawang merah di Kabupaten Lombok Timur mencapai 2.039 hektar, tersebar di hampir di seluruh wilayah kecamatan kecuali di kecamatan Terara, Masbagik, Pringgasea dan Suralaga. Empat kecamatan dengan lahan paling luas yaitu : Pringgabaya, Sambelia, Sembalun dan Sakra Timur. Produksi bawang merah saat ini telah mampu memenuhi kebutuhan lokal. Namun Pada tahun 2023 ini karena adanya pengaruh cuaca yang tidak menentu (El Nino) mengakibatkan terjadinya gagal panen sehingga mengganggu pasokan, berdasarkan laporan neraca pangan kabupaten posisi ditahun 2023 ini mengalami defisit sebanyak 200 ton, sehingga bawang merah ini seringkali muncul sebagai komoditas dengan fluktuasi harga yang cukup tinggi.

Disamping penanaman mandiri oleh petani Dinas Pertanian juga mendapat alokasi DAK sebagai pilot proyek untuk mengembangkan varietas baru seluas 15 hektar.

Kendala pengembangan budidaya bawang merah banyak disebabkan masih tingginya biaya budidaya terutama harga bibit, oleh karena itu perlu alternatif lain berupa bibit biji (Sanren) yang harganya lebih murah dari bibit umbi serta tahan terhadap cuaca dan penyakit. Dengan adanya alternatif ini diharapkan minat petani dalam budidaya bawang merah akan meningkat.

2. Memberikan Stimulus dari APBD berupa Subsidi Bunga Bank untuk Pembiayaan Usaha Tani dan Peternakan

3. Kegiatan Penanganan Inflasi secara Periodik oleh TPID

4. Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten
5. Penyusunan Neraca Pangan Periodik di Kabupaten Lombok Timur.
6. Operasi Pasar Murah
7. Sidak Pasar
8. Program Pangan Lestari untuk menggalakkan Gerakan menanam.

4. Komunikasi dan Koordinasi Kerjasama antar daerah dalam penangan inflasi

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan

1. Program Penguatan Produktivitas Pertanian sebagai Komitmen Pemerintah Daerah dalam Penanganan Inflasi dan Tetap Menjaga Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang rendah.

Kegiatan ini sudah berjalan cukup baik dan secara produksi sudah mencukupi kebutuhan di daerah, namun masih belum optimalnya koordinasi antara pemerintah propinsi dan kabupaten/kota, tatkala terjadi panen raya seringkali hasil produksi yang ada banyak yang dibawa keluar daerah karena persaingan harga antara pengusaha di daerah dengan pengusaha luar, sehingga persediaan di daerah terganggu.

2. Memberikan Stimulus dari APBD berupa Subsidi Bunga Bank untuk Pembiayaan Usaha Tani dan Peternakan

Program ini sudah berjalan dengan baik khususnya di bidang peternakan dan UMKM, perlu komitmen Bersama agar usaha pertanian juga dapat diserap lebih banyak

3. Kegiatan Penanganan Inflasi secara Periodik oleh TPID

Kegiatan-kegiatan koordinasi di Sekretariat TPID sudah berjalan dengan baik namun perlu adanya Fasilitasi dan Penguatan Anggaran dari APBD untuk mendukung upaya penanganan intervensi langsung tatkala harga kebutuhan pokok menunjukkan gejala kenaikan harga sehingga dapat diantisipasi dengan cepat.

Komunikasi dan Koordinasi Kerjasama antar daerah dalam penanganan inflasi

4.

Telah terjalin Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Kota Mataram dan Kota Bima perlu ditindaklanjuti dengan Kerjasama B to B sehingga Kerjasama yang ada dapat berjalan dengan optimal.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Rekomendasi

2. Perlu adanya dukungan pemerintah untuk menyediakan bibit unggul dan sarana produksi lainnya seperti pupuk dan obat-obatan agar tidak terjadi kelangkaan pada saat musim tanam berlangsung.
3. Dengan adanya perluasan tanam terutama untuk tanaman padi perlu didukung dengan prasarana irigasi yang memadai dan bila perlu diupayakan dukungan irigasi pompa terutama di daerah kering.
4. Dukungan dan fasilitasi pemerintah untuk mendukung penguatan permodalan pengusaha penggilingan padi di daerah agar mampu menyerap gabah petani pada saat panen raya untuk mendukung penguatan stok pangan daerah.